

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR
0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg TENTANG PENOLAKAN ISBAT
NIKAH**

SKRIPSI

Oleh

Novia Tri Utami

NIM. C91217139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Tri Utami

NIM : C91217139

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum /Perdata Islam /Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Penolakan Isbat Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Novia Tri Utami
NIM. C91217139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novia Tri Utami NIM.C91217139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 April 2021
Pembimbing

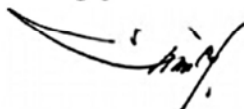
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Isfironi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Drs. Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Skripsi yang ditulis Olch Novia Tri Utami NIM C91217139 Ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah,

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,



Moh. Hatta. S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Rizky Abrian S. S. M. Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 17 Juni 2021


Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




H. Masruhan M. Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novia Tri Utami
NIM : C91217139
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address : noviautami257@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA BANDUNG NOMOR 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg TENTANG PENOLAKAN
ISBAT NIKAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2021

Penulis

(Novia Tri Utami)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Penolakan Isbat merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini memiliki tujuan menjawab rumusan masalah yaitu, Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim PTA Bandung dalam penetapan perkara No.0023/Pdt.G/2018/PTA Bdg tentang penolakan isbat nikah dan Bagaimana Analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat nikah?

Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang akan dikaji ini. Data yang dikumpulkan berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, kemudian data diolah secara editing dan organizing. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan semua data yang akan dikaji, kemudian data disusun secara rapi untuk dianalisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan pola deduktif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian disimpulkan secara khusus ke hukum islam.

Kesimpulan hasil penelitian yaitu: Pertama, Banyaknya berbagai persyaratan sahnya perkawinan yang tidak bisa dipenuhi oleh para Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan banding terkait pengesahan nikah para Pembanding, Kedua Pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka pintu lebar bagi para pasangan suami istri yang ingin melakukan pencatatan nikah bagi mereka yang pernikahannya belum pernah dicatatkan sama sekali dan belum pernah mendapatkan surat nikah dengan persyaratan rukun serta syarat nikahnya telah terpenuhi baik secara hukum agama maupun yuridis dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 003/Pdt.G/2018/PTA.Bdg yang menolak isbat nikah para pemohon telah sesuai dengan tujuan syariah.

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini, kepada Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara tetap harus mempertimbangkan *maqāṣid sharī'ah* agar kemaslahatan tercapai bagi para pencari keadilan dan kepada masyarakat hendaknya jangan melakukan nikah bawah tangan atau nikah siri karena dampaknya akan banyak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	18
I.Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI <i>MAQ̣AṢID SHARĪ'AH</i>.....	26
A.Konsep Pernikahan.....	26
1.Rukun Nikah dan Macam-Macamnya.....	26
2. Syarat Nikah dan Macam-Macamnya	33
3.Isbat Nikah.....	39
B. <i>Maq̣aṣid Sharġ'ah</i>	46
1. Pengertian <i>Maq̣aṣid Sharġ'ah</i>	46
2. Tujuan Pemberlakuan Hukum dalam Islam	49
3.Pemeliharaan Al-Dharuriyyat Al-Khams	52

A. Latar Belakang Masalah

1

Tujuan dari pernikahan antara lain. Pertama, membangun keluarga yang senantiasa senang, bahagia dan utuh selamanya. Antara suami dan isteri harus saling memiliki satu sama lain, saling bergotong royong dalam membina bahtera rumah tangga. Kedua, membentuk keluarga yang *sakīnah* (ketenangan dan ketentraman), *mawaddah* (mencintai, menghormati), *warāḥmah* (menyayangi, melindungi). Ketiga, untuk memperoleh dan memperbanyak keturunan dari adanya suatu pernikahan yang sah. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan seksual, yakni serang suami isteri bisa bersenang-senang menikmati suatu hubungan yang telah halal salah satunya dengan persetubuhan badan yang halal antara suami isteri dengan didasari rasa saling mencintai dan menyayangi.²

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 23.
² Ibid., 26.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

rtikan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan

g wanita serta memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Pasal 2

ilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 354.

ikatan yang sangat kuat (*Mithsāqan Ghafidzān*) yang pelaksanaannya merupakan suatu ibadah yang juga diperintahkan oleh Allah swt.⁵

⁸ Ibid., 2.

[illegible]

Adapun *illat* dari pencatatan utang piutang merupakan tanda bukti keabsahan

Pernikahan siri yang dikenal dalam masyarakat merupakan nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan seorang wali nikah dan dilihat oleh dua orang saksi juga, namun pernikahannya tidak dilakukan di depan pegawai pencatat

[illegible]

Bagi pasangan yang telah menikah secara agama dan belum pernah mencatatkan pernikahannya di depan pegawai pencatat nikah, ada mekanisme isbat nikah yaitu penetapan atas pengesahan keabsahan nikah secara negara dari pengadilan. Suami isteri yang belum mendapat buku nikah atau pernikahannya belum dicatatkan bisa melakukan isbat nikah di pengadilan. Terhadap pernikahan yang belum dicatatkan dan dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim merujuk pada Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara umum untuk setiap pernikahan bawah tangan yang telah terjadi dengan syarat adanya pemeriksaan serta putusan dari Pengadilan bahwa pernikahannya tersebut telah sah dan tidak melanggar hukum perkawinan, maka isbatnya bisa dikabulkan oleh hakim. Apabila dalam pernikahannya terbukti di persidangan tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah nya pernikahan, maka akan ditolak permohonan isbat nikahnya tersebut.¹²

¹² Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol.8.No.2 (Juli, 2013), 142.

tidak diakui secara hukum dan pihak perempuan
dikatakan oleh adanya pernikahan siri atau bawah ta
yang penting, bukan hanya untuk sekedar melegalkan
untuk persyaratan administrasi lainnya seperti
anak-anak serta keturunannya nanti, kelengkapan a
siri serta pengurusan kelengkapan administrasi
permasalahan permohonan talak ataupun gugatan
dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA
jamilan, jumlah perkawinan siri berkurang, namun fa
asyarakat yang melaksanakan nikah siri dan meng
terlalu penting atau bahkan sebagian dari mer

nya dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA. Selain itu, jumlah perkawinan siri berkurang, namun faktor budaya masyarakat yang melaksanakan nikah siri dan menganggap pernikahan siri terlalu penting atau bahkan sebagian dari mereka

pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama
8/PTA.Bdg yang menolak perkara pengesahan nika

Permohonan isbat di Pengadilan tingkat pertama ditolak, akhirnya Pemohon mengajukan banding dengan permohonan yang sama namun, lagi-lagi permohonan isbat nikah para pemohon di tingkat banding juga ditolak dan Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang dengan penambahan beberapa pertimbangan lain diantaranya, adanya pernikahan poligami dan pernikahan campuran antara para pemohon, karena lengkapnya pertimbangan hakim di tingkat banding, maka penulis memilih untuk meneliti di tingkat bandingnya.¹⁴

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg.

Setelah menguraikan latar belakang terdapat beberapa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Persyaratan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim PTA Bandung dalam penetapan perkara No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat nikah.
3. Dampak positive dan negative dari adanya penolakan isbat nikah.
4. Analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat nikah.

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat nikah.

- ### C. Rumusan Masalah

- #### D. Kajian Pustaka

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.

Skripsi oleh Zuni Ayu Pratiwi NIM C71214064 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri oleh wali muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”. Skripsi ini mengkaji putusan hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah menggunakan wali muhakam dengan dasar pertimbangan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan jika

[illegible]

ditinjau dari segi hukum positif yang disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah wali hakim sesuai yang telah diatur di Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas putusan isbat nikah. Perbedaannya, jika skripsi ini lebih fokus terhadap analisis yuridis pengabulan isbat nikah dengan wali muhakam, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji terkait analisis hukum islam terhadap penolakan permohonan isbat nikah.¹⁷

Skripsi oleh Haerul Anwar NIM C91214128 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur (Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No.0247/Pdt.P/2014/PA.Smp) ”. Skripsi ini membahas pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon dan termohon telah memenuhi rukun nikah secara agama tetapi syarat nikah secara negara belum terpenuhi yakni salah satu mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan sesuai yang telah diatur di Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim juga mengkaitkan dengan *maṣlahah mursalah* yakni mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghindari maupun

¹⁷ Zuni Ayu Pratiwi “*Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri oleh Wali Muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*”, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Skripsi oleh Lilik Setyawan NIM 2121103 IAIN Salatiga pada tahun 2015. Skripsi dengan judul “ Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Anak (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga No.0077/Pdt.P/2014/PA.Sal)”. Skripsi ini mengkaji dampak penolakan isbat nikah terhadap hak anak, jika kedua orang tuanya bercerai anak tidak berhak atas warisan oarang tuanya, anak juga akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan kedua orang tuanya dianggap belum pernah terjadi secara negara. Persamaan dengan skripsi ini sama sama mengkaji putusan penolakan isbat nikah. Perbedaanya, skripsi ini mengkaji terkait dampak yang akan timbul terhadap anak dari adanya penolakan isbat nikah, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji terkait analisis hukum islam terhadap penolakan isbat nikah.²⁰

E. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya penulis memiliki tujuan, tujuan dari adanya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PTA Bandung dalam penetapan perkara No.0023/Pdt.G/2018/PTA Bdg tentang penolakan isbat nikah.

²⁰ Lilik Setyawan “*Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Anak (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga No.0077/Pdt.P/2014/PA.Sal)*” (Skripsi –IAIN Salatiga, 2015).

- ## 1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

1. Aspek Teoritis

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman di setiap pembahasan terkait judul skripsi di atas, maka penulis mencantumkan definisi operasional pada beberapa istilah antara lain sebagai berikut :

1. Hukum islam dalam penelitian ini merupakan sekumpulan aturan keagamaan yakni perintah-perintah Allah swt yang mengatur perilaku-perilaku kehidupan orang islam khususnya juga yang mengatur terkait pernikahan seseorang dalam hal ini yang berhubungan dengan rukun dan syarat nikah.²¹ Di dalam kajian ini penulis menggunakan hukum islam berupa KHI dan *maqāṣid sharī'ah*. Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan hukum sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk juga untuk perkara perkawinan orang yang beragama Islam. *Maqāṣid sharī'ah* dalam penelitian ini merupakan suatu tujuan dari adanya hukum syariah dan tujuannya tersebut untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²² Termasuk juga di dalam penerapan *maqāṣid sharī'ah* di dalam suatu putusan hakim terkait permohonan isbat nikah.

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

²² Ibid., 75.

2. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini merupakan pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara yang mana juga didasarkan pada pertimbangan secara hukum.
3. Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata isbat dan nikah. Isbat yaitu suatu penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan maksudnya sungguhan dan membenarkan sesuatu. Menurut fiqh nikah artinya persenggamaan atau bercampur, sedangkan menurut hukum positif nikah merupakan ikatan lahir batin antara suami istri guna membangun rumah tangga yang bahagia. Jadi, intinya isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang belum tercatatan antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang sah, baik secara agama maupun secara Negara.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pengertian sederhananya yakni tata cara atau langkah dalam melakukan penelitian. Metode merupakan cara kerja yang sistematis untuk mengetahui suatu obyek penelitian. Penelitian merupakan proses mengumpulkan dan menganalisa data-data yang dilakukan secara tertata guna mencapai tujuan-tujuan akan diharapkan. Jadi, metode penelitian

²³ Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum ...*, 65.

merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.²⁴

Penelitian yang penulis kaji ini biasanya disebut dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini hukum dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma (kaidah) berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas dan harus ditaati. Untuk itu disini penulis mengambil data perkara banding pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat nikah.²⁵

1. Data yang Dikumpulkan

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis guna mengolahnya yakni sebagai berikut :

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memutus.
- b. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan awal dimana data akan digali. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan

²⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 2.

²⁵ Ibid., 123.

sumber data yang langsung atau tidak melalui perantara. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung yaitu masih lewat orang lain atau berupa lewat dokumen. Sumber data primer ini sebagai pendukung sumber data sekunder.²⁶

a. Data Primer

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr tentang permohonan pengesahan nikah (isbat nikah).
- 2) Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang pengajuan banding terhadap permohonan pengesahan nikah (isbat nikah).

b. Data Sekunder

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Buku-buku Fiqih klasik antara lain ;
 - a) Fiqh Islam Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az Zuhaili
 - b) Fiqh Munakahat, karya Dahlan
 - c) Ensiklopedia fikih Indonesia Pernikahan, karya Ahmad Sawwat
- 3) Buku-buku terkait Hukum Perkawinan di Indonesia antara lain :

²⁶ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (T.tp.:t.p.,2019), 74.

- a) Buku Ajar Hukum Perkawinan, karya Jamaluddin, Nanda Amalia
- b) Hukum Keluarga Islam, karya Mardani
- c) Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang tertata untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan agar menjadi satu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi bisa disebut juga dengan sumber yang bukan dari manusia (*non human resources*) dalam penelitian ini peneliti mencari kemudian mengumpulkan data-data yang telah ada menjadi satu, semisal dari dokumen, foto, bahan statistik, catatan-catatan, notula rapat, peraturan pemerintah, surat-surat resmi, dan lain sebagainya.²⁷

Penulis mengumpulkan data berupa dokumen resmi yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang mana disini penulis menemukan bahan untuk dijadikan penelitian yaitu terkait penolakan permohonan isbat nikah karena tidak

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 115.

terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara yuridis dan kemudian penulis menganalisisnya secara hukum islam yang penjabarannya terletak pada analisis KHI dan *maqāṣid shari'ah* terhadap penolakan isbat nikah pada perkara banding.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Memeriksa dan meneliti data dengan memilih, menyeleksi data agar jelas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini memeriksa kembali salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.G/2018/TA.Bdg dari segi identitas pemohon dan termohon, kronologi permasalahan, pertimbangan hukum hakim dan putusan.

b. Organizing

Yakni data yang ada akan diatur, disusun dan diolah, dalam hal ini yakni data dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama bandung No.0023/Pdt.G/2018/TA.Bdg sehingga diperoleh bahan yang nantinya dijadikan sebuah rumusan masalah.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan semua data yang akan dikaji, kemudian data tersebut disusun secara teratur untuk kemudian dianalisis menggunakan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Saat menganalisis penulis memaparkan hal-hal yang masih bersifat umum dahulu kemudian dianalisis ke dalam hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang konsep pernikahan, isbat nikah, kemudian dianalisis secara khusus menggunakan hukum islam tepatnya secara *maqāṣid shari'ah* terkait putusan Banding terkait penolakan isbat nikah tersebut.

[illegible]

Bab pertama memuat pendahuluan yang isinya antara lain, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Ketiga memuat data penelitian tentang kasus perkara yang menjadi obyek penelitian yakni deskripsi tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg tentang penolakan isbat.

Bab keempat memuat analisis data yakni yang pertama, penulis menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung No.0023/Pdt.g/2018/PTA Bdg dalam penetapan perkara penolakan isbat nikah. Kedua, dilanjut membahas analisis hukum islam yang memuat peninjauan secara KHI dan *maqāṣid shari'ah* terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg tentang penolakan Isbat nikah.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta penulis juga memberikan saran-saran yang berkaitan dengan topic pembahasan untuk upaya kedepannya dari adanya penelitian ini.

BAB II

A. Konsep Pernikahan

1. Rukun Nikah dan Macam-Macamnya

Rukun secara yang kita ketahui dalam bahasa arab artinya sudut pada ruangan, tiang, penyangga, penegak bangunan. Secara istilah arti rukun adalah apa yang membuat sesuatu itu harus ada dengannya. Pendapat jumhur ulama rukun yaitu hal yang harus ada dalam sesuatu. Dalam menjalankan suatu ibadah rukun harus terdapat di dalam kegiatan ibadah dan merupakan bagian yang satu dari sebuah rangkaian kegiatan ibadah tersebut tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam menjalankan akad pernikahan, jika unsur-unsur tersebut tidak ada maka pernikahannya dianggap tidak sah.²⁹

Para ulama empat mazhab berbeda pendapat terkait penetapan rukun pernikahan, berikut ini rukun pernikahan menurut masing-masing mazhab:³⁰

a. Mazhab Hanafi :

- 1) Calon mempelai
- 2) Ijab dan qabul

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 90.

³⁰ Ibid., 91

tetap dianggap sah hal ini menurut pendapat jumhur. Dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 236:³¹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Rukun nikah yang telah disepakati para ulama ada 4 diantaranya sebagai berikut:³²

1. Adanya Calon suami dan istri

Calon suami istri atau yang disebut dengan *az-zaujaini* merupakan pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan, calon suami dan istri merupakan rukun nikah menurut jumhur ulama.

2. Wali

Wali merupakan ayah kandung calon mempelai perempuan yang akan melakukan ijab atau yang akan mengikrarkan pernikahan. Jumhur ulama bersepakat kecuali Imam Abu Hanifah bahwa, keberadaan wali merupakan

³¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan...*, 38.

³² Ibid.,93.

Di dalam pasal 19 sampai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan terkait perwalian dalam sebuah pernikahan. Pasal 20 ayat 2 KHI menjelaskan wali nikah ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang mempunyai hubungan dekat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pasal 21 KHI menjelaskan terkait pengelompokan wali nasab menjadi empat kelompok dalam urutannya, kelompok pertama yaitu kelompok yang erat kedudukannya yakni kelompok dari garis lurus atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, kelompok kerabat kakak atau adik laki-laki kandung, kakak atau adik laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga, seperti paman atau saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat, saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila diurutkan, urutannya sebagai berikut :³³

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah)
- 3) Kakak atau adik laki-laki sekandung
- 4) Kakak atau adik laki-laki seayah

[illegible]

- 5) Keponakan laki-laki dari kakak atau adik laki-laki kandung
- 6) Keponakan laki-laki dari kakak atau adik laki-laki seayah
- 7) Paman dari ayah sekandung
- 8) Paman dari ayah seayah
- 9) Saudara laki-laki kakek yang seayah
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
- 11) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

Urutan wali di atas maksudnya, apabila wali pertama tidak bisa menjadi wali nikah karena ada suatu halangan tertentu, maka wali nikah dalam urutan yang telah dijelaskan di atas bisa menggantikan posisi wali pertama sesuai dengan yang telah dikelompokkan menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya wali hakim, dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan wali hakim dari pegawai KUA dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab dari pihak perempuan tidak ada sama sekali atau tidak bisa untuk dihadirkan, jauh keberadaannya, wali nasab enggan atau tidak mau menikahkan, dan lain sebagainya.

Dalam buku karangan Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim dengan judul “Hukum Perkawinan Islam“, menjelaskan bahwa Azhar Basyir membagi wali nikah ada 3 yaitu, wali mujbir, wali hakim, dan wali

muhakam. Pertama, wali mujbir merupakan wali yang bisa memaksakan gadis yang berada pada perwaliannya untuk dikawinkan dan wali mujbir ini terdiri dari ayah, kakek, serta keturunan di atasnya. Kedua, wali hakim merupakan wali yang kedudukannya menggantikan wali nasab saat wali nasab terdapat halangan. Ketiga, wali muhakam merupakan wali yang juga bisa menjadi wali nikah bilamana seorang wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali atau tidak mempunyai wali nasab, maka disinilah kedudukan wali muhakam yang akan ditunjuk mempelai wanita untuk menjadi wali nikahnya.³⁴

Menurut al-Qurtubi dalam buku karangan Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi yang berjudul “Ringkasan Fikih Sunnah Sayyiq Sabiq”, Bilamana seorang perempuan berada di suatu wilayah tertentu tidak ada seorang pun yang bisa menjadi walinya dan perempuan tersebut berada di tempat yang ada kekuasaan kaum muslimin, maka ia boleh dan dibenarkan untuk menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai pengganti walinya saat pernikahan. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sakral, oleh karena itu harus dilakukan hal terbaik agar perkawinannya tersebut dapat terlaksana.³⁵

3. Saksi

³⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta :Gama Media, 2017),

³⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyiq Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 454.

Saksi merupakan laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi terhadap terjadinya suatu peristiwa pernikahan seseorang. Persaksian sangat penting terhadap terjadinya akad pernikahan, karena hal ini untuk menyaksikan suatu pernikahan agar tidak terjadi keraguan maupun fitnah dalam suatu ikatan pernikahan. Saksi menjadi salah satu alat bukti untuk menghilangkan keragu-raguan benar atau tidaknya telah terjadinya pernikahan.

4. Ijab dan Qabul

Ijab yaitu serangkaian ucapan memberikan, mengasihkan, menyerahkan dari pihak calon mempelai perempuan oleh walinya dan menggambarkan bahwa si calon mempelai wanita ini akan mengikatkan diri dengan calon mempelai laki-laki. Sedangkan qabul merupakan serangkaian kalimat menerima dari pihak mempelai laki-laki.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung menegaskan terkait rukun suatu pernikahan, pasal ini menjelaskan suatu ikatan pernikahan sah bilamana dilakukan dengan menganut aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, semisal apabila ada sepasang suami istri yang beragama islam dan akan melaksanakan suatu pernikahan, maka rukun pernikahannya pun juga harus sesuai aturan di dalam ajaran agama islam.

2. Syarat Nikah dan Macam-Macamnya

Wahbah Az-Zuhaili dalam karya bukunya, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu" menyebutkan ada sepuluh syarat-syarat sahnya pernikahan yang telah disepakati oleh para ulama, meskipun sebagian masih ada yang diperselisihkan. Sepuluh syarat-syarat sahnya pernikahan adalah sebagai berikut:³⁷

³⁶ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, 327.

[illegible]

pernikahan untuk selamanya bukan hanya untuk sementara. Pernikahan yang hanya dibatasi untuk waktu tertentu saja, maka pernikahannya dianggap tidak sah dan batal.

c. Persaksian

Pernikahan harus dihadiri dua orang saksi, saksi hendaknya telah baligh dan berakal, saksi harus laki-laki ini menurut pendapat jumhur ulama kecuali Hanafiyah, saksi harus merdeka, saksi harus adil dalam artian mengikuti ajaran-ajaran agama serta tidak berbuat kefasikan (kerusakan). Saksi beragama islam, saksi hendaknya dapat melihat, saksi hendaknya dapat mendengar, saksi hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Pernikahan harus mendapat persetujuan atau ridha dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad nikah, apabila kedua

akan membuat pernikahannya menjadi rusak, karena pengumuman pernikahan bisa direalisasikan dengan kehadiran dua orang saksi.

i. Tidak saling mengidap penyakit yang mengawatirkan

Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sah apabila dirinya mengalami sakit dan penyakitnya tersebut bisa membahayakan diri mereka atau bahkan penyakitnya bisa menyebabkan kematian. Apabila pernikahannya terjadi, maka harus dibatalkan.

j. Wali

Jumhur ulama berkata bahwa pernikahan tidak akan dapat terlaksana jika hanya dengan ungkapan dari mempelai perempuan, apabila ada seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri meskipun telah mendapat izin dari walinya, maka hal ini pernikahannya dianggap tidak sah. Kehadiran wali penting dalam suatu pernikahan dan juga telah disebutkan di atas bahwa wali adalah termasuk rukun nikah. Syarat wali antara lain; Beragama islam, baligh, mempunyai akal yang sehat, seorang laki-laki, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram.

Syarat pernikahan dalam hukum positive diatur di dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku

Dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan, di pasal ini menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali nikah. Kemudian di pasal 8 menjelaskan juga terkait syarat perkawinan yaitu perkawinan dapat dilaksanakan dengan tidak ada larangan perkawinan antara kedua mempelai, kemudian Pasal 9 menjelaskan bahwa syarat nikah seseorang tidak boleh ada ikatan perkawinan dengan orang lain dan jika hal tersebut terjadi pada seorang calon mempelai laki-laki, maka calon mempelai laki-laki ini harus memperoleh izin dari Pengadilan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu, dan Pasal 11 menjelaskan persyaratan perkawinan bagi seorang perempuan yang masih menjalani masa tunggu akibat putusnya suatu perkawinan harus menunggu sampai masa tungguanya selesai sehingga boleh melangsungkan perkawinan lagi.³⁸

³⁸ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, 325.

- diwakilkan dalam ke
pria tidak bisa hadir d
pria memberi surat kuasa s

Mengisbatkan berarti menyanggahkan atau membenarkan sesuatu. Nikah secara terminologis merupakan ikatan yang diperbolehkannya untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan

istrinya, dengan syarat yang dinikahi bukan merupakan seseorang yang diharamkan untuk menikah.⁴¹

Isbat nikah adalah menetapkan suatu pernikahan antara suami dan istri yang pernikahannya sudah dilaksanakan secara agama yakni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun pernikahannya tersebut belum pernah tercatat atau belum tercatat di depan pegawai pencatat perkawinan.⁴²

Perkara isbat nikah termasuk ke dalam perkara voluntair pada kewenangan Pengadilan Agama. Perkara voluntair merupakan perkara yang tidak ada pihak lawan atau hanya permohonan pemohon saja.⁴³

Dasar hukum isbat nikah diantaranya diatur di dalam 49 Pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya memuat Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara salah satunya terkait perkawinan dan isbat nikah atau pengesahan nikah ini salah satu unsur yang ada dalam bidang perkawinan tersebut. Dasar hukum lainnya yakni Pasal 2 dan Pala

⁴¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁴² Zainuddin, Affan Zainuddin *kepastian hukum perakwian sirri...*, 65.

⁴³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2019), 126.

- 1) Perkawinan yang tidak memiliki surat nikah serta tidak bisa dibuktikan perkawinannya, maka dapat mengajukan isbat nikah.
- 2) Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama hanya hanya menyangkut kepentingan sebagai berikut: untuk urusan penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, terdapat keraguan disalah satu syarat sahnya perkawinan, perkawinan yang telah sah baik rukun dan syarat nikah atau lebih tepatnya tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pernikahan yang dilaksanakan secara siri sehingga tidak memperoleh surat nikah, ada jalan keluar yang dapat ditempuh yakni dengan mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahannya dapat dicatatkan dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya.

[illegible]

Persyaratan isbat nikah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak semua permohonan isbat nikah akan dikabulkan, artinya apabila syarat-syarat permohonan telah

[illegible]

[illegible]

Pemeriksaan bersifat kontensius merupakan kewenangan Pengadilan Agama yaitu untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan suatu perkara untuk memberikan putusan yang adil. Pemeriksaan isbat nikah kontensius mendudukkan suami atau istri bukan yang mengajukan permohonan isbat nikah melainkan mereka nantinya akan menjadi termohon. Produk hukum Pengadilan Agama berupa putusan dan hal ini juga bisa diajukan upaya hukum.

- 5) Seorang suami yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan istrinya yang lain, maka istri terdahulunya tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika tidak dilibatkan Pengadilan Agama tidak akan menerima permohonan isbat nikah pemohon.
- 6) Apabila salah satu pasangan suami isteri meninggal, ahli warisnya dijadikan sebagai termohon dalam permohonan isbat nikahnya dan produk hukumnya berupa putusan.
- 7) Apabila suami atau istri tidak mempunyai ahli waris permohonan isbat nikah dapat diajukan secara voluntair dan produk hukumnya berupa sebuah penetapan.
- 8) Pihak lain yang memiliki kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara isbat nikah, bisa mengajukan perlawanan kepada Pengadilan

terlalu berlebihan dengan mengambil jalan tengahnya. *Maqāṣid* merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tercapainya sebuah tujuan hidup dan tujuan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada sebuah jalan kebenaran.⁴⁸

Syariah secara bahasa artinya tempat air mengalir, tempat air mengalir dimana para hewan meminum disana, kata lain *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air). Selain itu kata *shari'ah* yang juga sering dipakai yakni *al-dyn* (agama), *al-ṭharyq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁴⁹ Berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Jatsiyah ayat 18 berbunyi sebagai berikut :⁵⁰

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutlah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak kamu ketahui.

Arti kata *shari'ah* sebagai sumber mata air dan tempat tumbuh bermakna bahwa air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Demikian kata *shari'ah* yang bermakna agama menunjukkan bahwa agama islam merupakan sumber kehidupan, pijakan orang muslim untuk kemaslahatan dan kemaslahatan ini tidak hanya di dunia saja, melainkan

⁴⁸ Busyro, *Maqaqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 6.

⁴⁹ Ibid., 7

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan...*, 500.

juga di akhirat kelak. Tidak adanya *shari'ah* menyebabkan manusia tidak akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh kebaikan.

Maqāṣid shari'ah dalam pengertian secara bahasa merupakan cara manusia untuk mendapatkan solusi-solusi penyelesaian masalah kehidupan yang dijalani agar sesuai dengan aturan hukum agama.

Dalam buku karangan Busyro, menurut Thahir Ibn Asyur sebagaimana dikutip oleh Manshur al Khalifi, *maqāṣid shari'ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh syari' yaitu Allah dan Rasulnya dalam penetapan suatu hukum. Sedangkan menurut Alal al Fasiy sebagaimana yang dikutip Busyro juga mendefinisikan *maqāṣid shari'ah* *qāṣid shari'ah al-ghayah* (sebuah tujuan akhir) dan *al-asrar* (rahasia-rahasia) yang diinginkan oleh syari' pada setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁵¹

Dari pernyataan yang telah dipaparkan pengertian *maqāṣid shari'ah* adalah sebuah rahasia guna tercapainya tujuan akhir diciptakannya suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya dan tujuan diciptakannya hukum syara' tersebut tentunya untuk membawa kemaslahatan bagi manusia. *Maqāṣid shari'ah* merupakan kiblatnya dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus

⁵¹ Busyro, *Maqaqashid Syariah...*, 9.

Kedua, Al-Hajiyat (keperluan sekunder), merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer telah terpenuhi, kebutuhan ini sebenarnya tidak sampai mengancam kemaslahatan apabila kita tidak memenuhinya, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan.

Ketiga tingkatan *maqāṣid* yang telah dijelaskan di atas masing-masing sangat berhubungan. Para ulama berpendapat secara umum, bahwa pemeliharaan kemaslahatan yang paling inti itu hanya dibatasi 5 pokok saja, diantaranya yaitu kemaslahatan agama (*hifdz dīn*), jiwa (*hifdz al-nafs*), keturunan (*hifdz al-nasl*), harta (*hifdz maal*), dan kemaslahatan akal (*hifdz 'aql*).

Kedua, persoalan untuk memelihara al-dharuriyyat al-khams disertai dengan ancaman-ancaman berupa sanksi fisik apabila ada larangan yang dilanggar, dan pelaku-pelakunya dianggap berdosa apabila melanggar larangan-larangan tersebut. Sanksi nya bukan hanya di dunia saja,

[illegible]

Ketiga, penemuan al-dharuriyat al-khams sebagai penemuan pemikiran para ulama. Dalam menetapkannya para ulama berpegang pada dalil-dalil yang telah ada. Para ulama menggunakan teori al-istiqaq' yaitu hanya 5 hal itu saja yang lebih difokuskan baik dalam hal ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan siyasah. Secara umum ketetapan hukum syari' berpusat pada al-dharuriyat al-khams (agama, jiwa, nasab, akal dan harta).

a. Memelihara Agama

[illegible]

b. Memelihara Jiwa

1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah yakni dengan selalu terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Misalnya seperti makan, memiliki pakaian dan memiliki tempat tinggal. Dalam hal ini syariat islam juga mengharamkan bunuh diri.

- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat al-hajiyah, misalnya mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup, menikmati makanan-makanan yang pastinya halal.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat al-tahsiniyah, tingkatan ini lebih cenderung pada akhlak yang baik dan terpuji dan sebagai pelengkap, misalnya makan dan minum sambil duduk tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, dan lain sebagainya.

Manusia hidup diberi akal oleh karena itu jelas beda antara manusia dengan binatang karena binatang diciptakan tidak mempunyai akal. Akal diciptakan untuk berfikir dan mencari solusi permasalahan kehidupan yang sedang dijalani. Seseorang yang tidak memelihara akalnya dengan baik akan mengakibatkan gangguan akal sehingga terganggu juga kehidupannya karena tidak bisa berfikir. Pemeliharaan akal dibagi menjadi tingkatan sebagai berikut :

- [illegible]

Memelihara akal dalam tingkat al-hajiyah, misalnya membngun sekolah, madrasah untuk menuntut ilmu dan tidak merusak sarana-sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu.

3) Memelihara dalam tingkat al-tahsiniyah, misalnya anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi yang baik demi mendapatkan pemahaman yang lebih maju, kemudian menghindarkan diri melihat hal-hal yang tidak berfaedah yang dapat mengganggu ketenangan akal, dan lain sebagainya.

3) Memelihara dalam tingkat al-tahsiniyah, misalnya anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi yang baik demi mendapatkan pemahaman yang lebih maju, kemudian menghindarkan diri melihat hal-hal yang tidak berfaedah yang dapat mengganggu ketenangan akal, dan lain sebagainya.

Sebuah perkawinan tentunya memiliki yaitu untuk mempunyai dan memiliki keturunan yang pastinya secara halal. Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan kemudian lahirlah keturunan yang sah tidak akan menyulitkan di kemudian hari saat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya seperti waris, nasab, kekerabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan juga penting. Berikut ini tiga tingkatan pemeliharaan keturunan :

Sebuah perkawinan tentunya memiliki yaitu untuk mempunyai dan memiliki keturunan yang pastinya secara halal. Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan kemudian lahirlah keturunan yang sah tidak akan menyulitkan di kemudian hari saat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya seperti waris, nasab, kekerabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan juga penting. Berikut ini tiga tingkatan pemeliharaan keturunan :

1) Memelihara keturunan di tingkat al-dharuriyah , misalnya seperti larangan untuk berzina karena apabila punya keturunan dari hasil

- 2) Memelihara keturunan di tingkat hajiyyat, misalnya seperti menghadirkan saksi saat akad pernikahan, hal ini berguna apabila suatu saat terjadi pengakuan perkawinan kemudian perkawinan tersebut telah memiliki keturunan, maka hal tersebut tidak akan menyulitkan.
- 3) Memelihara keturunan tingkat al tahsiniyah, misalnya tidak kawin dengan kerabat dekat sendiri, karena hal ini bisa menimbulkan kesehatan fisik maupun mental kelak pada keturunan yang akan dilahirkan, sebuah perkawinan harus dilaksanakan dengan baik dan perkawinan yang baik nantinya juga akan berhubungan dengan adanya keturunan yang baik pula.

Harta sebagai penyambung hidup manusia. Dengan harta orang mendapatkan apa yang dia mau dan dengan harta juga orang dapat melaksanakan ibadah dengan baik, seperti sadaqah, infaq dan lain sebagainya. Harta menjadi penyangga kehidupan manusia dan diakui oleh Allah swt untuk memilikinya. Oleh karenanya, Allah swt

[illegible]

melarang manusia mengambil, merampas harta milik orang lain dan memerintahkan untuk mencari harta secara halal. Berikut 3 tingkatan pemeliharaan harta :

- 1) Memelihara harta tingkat al-dharuriyah, misalnya kewajiban berusaha mencari rezeki yang halal, kewajiban beramanah dalam hal menjaga harta orang lain yang telah dititipkan terhadap diri sendiri, larangan merampok harta orang lain, larangan berbuat riba, dan lain sebagainya.
- 2) Memelihara harta tingkat al-hajiyah, misalnya diperbolehkan melakukan sewa menyewa, utang piutang, kemudian dilarang melakukan monopoli atau pun menimbun barang sehingga merugikan orang lain.
- 3) Memelihara tingkat al-tahsiniyah, misalnya dianjurkannya untuk bersedekah, kemudian larangan untuk boros terhadap harta ataupun mubazir dalam hal penikmatan harta dan lain sebagainya.

BAB III

A. Kronologi Putusan Penolakan Isbat Nikah pada Pengadilan Tinggi Agama

Diawali dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor perkara 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Pada tanggal 23 November 2014 antara Pemohon 1 dan 2 dilaksanakan pernikahan siri di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Mereka menikah menggunakan wali yang bernama Drs. Saykhi lalu dihadiri oleh 2 orang saksi adik kandung Pemohon 1 yang bernama Abdul Aziz dan Mohammad Toha dan menggunakan mahar kitab suci Al-Qur'an serta seperangkat alat salat.

Saat Pemohon 1 dan 2 menikah siri, antara Pemohon 1 dengan Termohon masih ada ikatan perkawinan. Pemohon 1 dan Termohon mempunyai dua orang anak yaitu, pertama bernama Hilda Umami Rahmadhan usia 22 tahun, anak kedua bernama Niko Rizky Arridho usia 19 tahun, sedangkan Pemohon 2 statusnya adalah seorang janda cerai.

Saat pernikahan para Pemohon berlangsung, pernikahan keduanya telah memenuhi rukun dan syarat nikah terpenuhi secara hukum Islam, serta tidak

Tahun 2016 Pemohon 1 dan Teromohon 2 telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama tanggal 23 Agustus 2016 putusan Nomor. 0836/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Pernikahan para Pemohon belum pernah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah. Pemohon 1 dan Pemohon 2 ingin mendapatkan surat nikah karena untuk kepastian hukum serta untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya dan juga untuk melakukan perbuatan hukum yang lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.g/2017/Pa.Ckr, 2.

Berikutnya guna memberikan kekuatan pada dalilnya para Pemohon menunjukkan bukti surat antara lain ;

- ya guna memberikan kekuatan pada dalilnya ;
- an bukti surat antara lain ;
- keterangan atas nama Pemohon
- 1/321606/IV/Disdukcapi/2017 (P1),
- y surat keterangan domisili Pemohon 2 Nomor 4
- y passport atas nama Pemohon 2 Nomor E249088
- ara RRT (P3),
- y surat Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2016/PA. D
- cerai antara Pemohon 1 dan Termohon (P4),
- opy akta cerai Pemohon 1 dengan T
- /2016/PA.Dpk (P5),

62

1) Saksi 1 bernama Abdul Aziz Khamdani (Adik kandung Pemohon 1)

Keterangan saksi 1 yang telah disumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi tahu antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah siri dengan menggunkan wali muhakam yaitu ustadz Drs.Saikhi bukan pegawai KUA karena wali Pemohon 2 adalah seorang ateis. Saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon 2 telah mengijinkan Pemohon 2 untuk menikah dengan Pemohon 1, saksi mengetahui bahwa Pemohon 1 masih beristri dan Pemohon 2 berstatus janda cerai. Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak terdapat larangan-larangan untuk melakukan pernikahan ada hubungan keluarga maupun sepersusun, saksi mengetahui pernikahan para pemohon tidak tercatatkan di KUA karena pada waktu itu Pemohon 1 masih beristri dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, dan saksi juga tahu para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikat untuk kepastian hukum dan akta kelahiran anak.

2) Saksi 2 bernama Syaikhi, S. Pd (Adik ipar Pemohon 1)

Keterangan saksi yang telah disumpah, bahwa saksi mengetahui Pemohon 2 adalah warga Cina yang bekerja di Indonesia, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dilaksanakan di Bogor pada bulan

November tahun 2014 dan dihadiri dua orang saksi, dan yang menjadi wali hakim adalah saksi sendiri yaitu Drs. Saikhi sedangkan yang mengijabqabulkan adalah ustadz Hidayatullah dan pengangkatan wali Pemohon 2 dilakukan oleh Pemohon 1, saksi mengetahui bahwa ayah Pemohon 2 seorang ateis, saksi mengetahui saat menikah siri Pemohon 1 masih mempunyai istri yaitu Termohon dan Pemohon 2 berstatus janda cerai, saksi mengetahui antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusun, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon satu telah bercerai dengan Termohon dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dalam hukum islam akan dianggap sah bilamana rukun dan syarat perkawinannya telah terpenuhi secara hukum islam, akan tetapi pernikahan yang dilakukan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara keseluruhan karena Pemohon 2 menggunakan wali yang tidak sesuai yaitu wali pernikahannya menggunakan wali yang ditunjuk bernama Syaikhi, S.Pd.

Pernikahan para Pemohon tidak dilaksanakan serta tidak tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga jika merujuk Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pernikahan para Pemohon dapat diajukan isbat.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 253-254 sebagai berikut :

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Sebelumnya juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya ketika seseorang menikah maka salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu dengan adanya wali nikah.

Dikarenakan wali Pemohon 2 adalah seorang atheis serta berkewarganegaraan China (Tiongkok) dan berada di Negara Cina, Pemohon I mengangkat wali hakim untuk Pemohon 2 yaitu Bapak Syaikhi, S, Pd bin Abdul Halim dan Bapak Syaikhi bukan merupakan Pegawai Pencatat Nikah maupun Penghulu.

Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah,

sedangkan wali nikah yang diangkat oleh Pemohon 1 bukan wali hakim sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

- 1) Majelis Hakim tingkat pertama dianggap mengesampingkan bukti dan fakta yang telah diungkapkan di persidangan,
- 2) Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat fakta perkara *a quo* merupakan perkara permohonan isbat nikah dan saat pernikahan siri terjadi Pemohon 1 masih mempunyai ikatan pernikahan Termohon sehingga permohonannya bersifat kontensius,
- 3) Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan isbat nikah karena Pemohon 2 menggunakan wali nikah yakni Syaikhi, S.Pd yang telah ditunjuk oleh Pemohon 1 dan hal ini tidak sesuai dengan rukun nikah sesuai yang telah diatur dalam KHI.

Para Pembanding mengajukan isbat nikah campuran karena Pembanding/Pemohon 2 berkewarganegaraan Cina. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara kedua mempelai yang memiliki perbedaan kewarganegaraan.

[illegible]

dilangsungkan apabila calon mempelai belum memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak dan ternyata para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Saat pernikahan siri berlangsung status Pembanding/Pemohon 2 adalah seorang janda cerai namun Pemohon 2 tidak dapat membuktikan surat percerainnya di dalam persidangan isbat nikah.

Saat akad nikah Pembanding/Pemohon 1 masih mempunyai istri yaitu Terbanding/Termohon dan oleh Majelis Hakim Pembanding/Pemohon 1 ini tidak memenuhi ketentuan sesuai yang telah diatur di dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Begitupun saat akad nikah status Pembanding/Pemohon 2 adalah seorang mualaf, namun Pembanding/Pemohon 2 tidak melampirkan bukti bahwa Pembanding/Pemohon 2 adalah seorang mualaf.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan macam-macam rukun nikah antara lain, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kemudian, pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah itu ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Pernikahan para Pembading menggunakan wali nikah yang bukan sesuai diatur dalam peraturan tersebut, wali nikah Pembanding/Pemohon 2 adalah

Perkawinan merupakan ibadah yang sakral untuk itu perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan rukun dan syarat nikah yang telah berlaku. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah dianggap tepat dan sesuai putusannya. Hakim Majelis tingkat banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, karena Termohon tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara, maka perkara tersebut diputus dengan putusan verstek.⁵⁷

1. Menyatakan permohonan banding secara formal diterima
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan para pemohon dengan verstek

[illegible]

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Terhadap Perkara Penolakan Isbat Nikah

Perkara permohonan isbat nikah yang awalnya diajukan di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga diajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan lagi-lagi perkara ini di tingkat banding juga ditolak yang mana Majelis Hakim membenarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal yang menjadi dasar penolakan Majelis Hakim karena pernikahan yang telah

70

dilaksanakan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dengan berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim akhirnya menolak pengesahan nikah para Pemohon.

Pertimbangan Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara tingkat pertama serta memori banding pada permohonan banding Pembanding, Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr yakni menolak permohonan isbat nikah para Pemohon.

Pertimbangan Hakim di tingkat pertama, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa terjadinya suatu pernikahan yang belum pernah dicatatkan dan belum pernah mendapatkan buku nikah dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat, untuk itu alasan permohonan para Pemohon dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah bisa diterima.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan itu akan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing baik agama dan kepercayaan. Bilamana suatu pernikahan dilakukan oleh seorang muslim, maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut harus sesuai dengan hukum islam baik rukun maupun syarat-syarat pernikahannya. Para Pemohon menyatakan telah melaksanakan pernikahan

ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada dua orang saksi, akad ijab qabul, sedangkan terkait syarat-syarat lainnya, Pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah diatur, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Dari pertimbangan yang telah disebutkan di atas, pernikahan para pemohon tidak terpenuhinya rukun pernikahan yang sesuai yang telah diatur di dalam pasal tersebut. Sehingga pernikahan yang menggunakan wali pernikahan yang tidak sesuai yang telah diatur di dalam pasal tersebut, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan yang menggunakan wali pernikahan yang tidak sesuai yang telah diatur di dalam pasal tersebut, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan yang menggunakan wali pernikahan yang tidak sesuai yang telah diatur di dalam pasal tersebut, pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada dua saksi, akad ijab qabul, sedangkan terkait syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam Pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang telah diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan syarat-syarat pernikahan yang telah diatur, maka pernikahan yang telah diatur tersebut sah. Dari pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka pernikahan para pemohon tidak terpenuhinya rukun pernikahan yang telah diatur di dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pernikahan yang menggunakan wali pernikahan yang tidak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bukan ayah kandung Pemohon 2.

Adapun perempuan yang akan menikah dan sedang hamil tersebut, maka perempuan yang mempunyai wali nikah bisa menggunakan wali

hakim berdasarkan yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan isbat nikah para Pemohon.

Dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan para Pemohon, pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding dalam perkara putusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg juga menolak permohonan banding Pembanding terkait permohonan isbat nikah. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pembanding ini juga masuk kategori pernikahan campuran karena si Pembanding 2/Pemohon 2 merupakan kewarganegaraan Cina, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara 2 orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijadikan pertimbangan hakim dalam hal pernikahan campuran, di pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perkawinan campuran hanya akan dapat dilaksanakan apabila telah ada bukti surat dari petugas yang berwenang bahwa syarat-syarat nikah para calon pengantin telah terpenuhi sehingga perkawinan campuran beda kewarganegaraan dapat dilaksanakan, namun untuk hal ini para Pembanding tidak dapat melengkapi surat-surat sesuai yang telah diatur dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 4, 5 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 menyatakan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin untuk beristri lagi kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, apabila alasan-alasan suami untuk beristri lagi telah dianggap memenuhi oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan surat penetapan pemberian izin untuk mempunyai istri lagi dari Pengadilan daerah tempat tinggalnya dan surat tersebut bisa digunakan untuk mendaftarkan pernikahan lagi pada Pegawai Pencatan Pernikahan, akan tetapi menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung lagi-lagi Pembanding 1 tidak menyertakan surat izin untuk menikah lagi dari Pengadilan.

[illegible]

Dengan begitu, banyaknya berbagai persyaratan sahnya perkawinan yang tidak bisa dipenuhi oleh para Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan banding terkait pengesahan nikah para Pembanding. Dengan ditolaknya permohonan isbat nikah tersebut para Pembanding tidak bisa mendapatkan akta maupun buku nikah serta pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis.

1. Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023 Pdt.G/2018/PTA.Bdg

[illegible]

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya Hakim tingkat banding dalam memutus perkara permohonan isbat nikah Nomor 0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg yang tak lain juga mengacu pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang penjelasannya sebagai berikut:

- [illegible]

- c. Terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan yang telah dilaksanakan
 - d. Perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 - e. Perkawinan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah antara lain suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah serta pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

Pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah membuka pintu lebar bagi para pasangan suami istri yang pernikahannya belum pernah dicatatkan sama sekali dan belum pernah mendapatkan surat nikah.

Sesuai yang telah dipaparkan dalam perkara isbat nikah Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, maka perkara tersebut masuk dalam hal yang tertera pada Pasal 7 ayat 3 huruf e yang menjelaskan bahwa perkawinan bisa mendapatkan legalitasnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus penuh dengan kehati-hatian apalagi dalam masalah perkawinan. Tidak semua perkara permohonan isbat

nikah yang diajukan oleh para pasangan yang belum mendapatkan legalitas pernikahannya di Pengadilan Agama akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebelum perkara isbat nikah diputus, Hakim akan memeriksa, meneliti alasan-alasan serta bukti-bukti apa saja yang diajukan oleh para Pemohon serta apakah pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai yang telah diatur baik secara yuridis maupun secara agama. Jika di dalam rukun dan syarat pernikahan yang telah dilangsungkan tidak terpenuhi maka hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya.

Permohonan Isbat nikah yang telah diajukan oleh para Pemohon dalam kasus di atas telah terbukti bahwa rukun dan syarat nikahnya tidak terpenuhi sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka keputusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah dianggap tepat secara yuridis.

2. Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Penolakan Isbat Nikah

Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk warga negara Indonesia yang beragama islam khususnya terkait perkawinan sendiri juga

diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana di setiap pasal-pasal nya mengambil dari hukum-hukum fiqih namun juga tetap berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan.

Telah diketahui pada kasus di atas Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan isbat nikah Nomor 0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg dengan alasan-alasan pertimbangan hukum sesuai yang telah dipaparkan di atas yakni karena secara yuridis pernikahan yang dilakukan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nya pernikahan.

Majelis Hakim tentunya mempunyai alasan yang kuat terkait penolakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, hal ini selain karena Majelis Hakim juga berpedoman dengan perundang-undangan yang ada ada alasan lain jika isbat nikah dengan mudah dikabulkan tanpa melihat alasan-alasan yang jelas dan teliti, yang demikian ini akan memicu banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri. Apalagi kita tahu dalam kasus di atas juga dikategorikan pernikahan poligami yang mana, bahwa pernikahan poligami tidak akan diizinkan sebelum memperoleh izin dari Pengadilan sesuai yang tertera dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menghindari penyelundupan hukum, penulis beranggapan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di

atas telah tepat secara yuridis. Dalam sebuah kaidah fiqih bunyinya sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan Imam atau Kepala Negara terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.⁵⁹

Secara hukum islam pernikahan para Pemohon telah dianggap sah karena rukun dan syarat nikahnya telah terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon 1 dan 2. Terkait wali nikah yang dipakai para Pemohon secara hukum fikih dianggap sesuai mengingat ayah Pemohon 2 seorang atheis yang tidak boleh untuk menjadi wali nikah karena wali nikah harus seorang laki-laki muslim. Syarat suami yang akan melakukan poligami secara hukum islam, bahwa seorang suami diperbolehkan berpoligami dengan syarat adil dan maksimal empat, hal ini sesuai yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :⁶⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلُثَ
وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau

⁵⁹ Moh Adib Bisri, *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyah : Risalah Qawaid Fiqih* (T.tp.: Menara Kudus, t.t.), 39.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Maqbul : Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Doa, (Bandung : Cahaya Kreatif Utama, 2018), 77.

Satu sisi ditolaknya isbat nikah para Pemohon akan berdampak pada status hukum pernikahan para Pemohon dan juga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena pernikahannya tidak mempunyai leglitas, semisal terjadi sengketa pernikahan seperti sengketa waris, harta bersama, nafkah istri, hak asuh anak, maka akan sulit diurus karena tidak mempunyai buku nikah. Hal ini

Namun penulis juga memandang Putusan hakim PTA Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg telah sesuai dengan kemaslahatan agama (*hifdz dyn*), dimana ketika Majelis hakim begitu saja mengkabulkan isbat nikah tentunya ini juga akan berdampak apakah pernikahan yang dilakukan secara siri benar-benar terbukti sah baik rukun dan syaratnya jika memang pada kenyataannya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perikahannya tidak sah dan jika melakukan hubungan suami isteri merupakan hubungan perzinaan. Agama telah melarang seseorang untuk berbuat zina dan zina juga merupakan perbuatan dosa besar.

Kemaslahatan terhadap *hifdz dyn* menjadi prioritas utama dalam hal menjaga kemaslahatan manusia karena imbasnya nanti tidak hanya untuk

o. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyah: Risalah*
adus, t.t.

id Syariah Pengetahuan Mendasar Memaha
2019.

Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*
enamedia Group, 2018.

ma RI. *Alqur'an dan Terjemahan Dilengkapi*
akarta: PT Suara Agung, 2018

n. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum* Is
2019.

da Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. S

snaini Nur. "Pertimbangan Hakim dalam P
Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari T
agadilan Agama Salatiga No.0073/Pdt.P /201
arta, 2019.

- o. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyah: Risalah*
adus, t.t.
- id Syariah Pengetahuan Mendasar Memaha
2019.
- Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*
enamedia Group, 2018.
- ma RI. *Alqur'an dan Terjemahan Dilengkapi*
akarta: PT Suara Agung, 2018
- n. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum* Is
2019.
- da Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. S
- snaini Nur. "Pertimbangan Hakim dalam P
Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari T
agadilan Agama Salatiga No.0073/Pdt.P /201
arta, 2019.

- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid 11 Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Oe, Meita Djohan. Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pranata Hukum* Vol.8. No.2. Juli, 2013.
- Pratiwi, Zuni Ayu. “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Siri oleh Wali Muhakam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). Haerul Anwar “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No.0247/Pdt.P/2014/PA.Smp)”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Setyawan, Lilik. “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Anak (Study Putusan Pengadilan Agama Salatiga No.0077/Pdt.P/2014/PA.Sal)”. Skripsi--IAIN Salatiga, 2015.
- Suadi, Amran, Mardi Candra. *Politik Hukum: Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Team Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Tobroni. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

- Wijaya, Helaluddin Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. T.tp.:t.p., 2019.
- Wilujeng, J. M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Admajaya, 2020.
- Zainudin, Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. T.tp.: Darul Fikir, t.t.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0581/Pdt.g/2017/Pa.Ckr.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.g/2018/PTA.Bdg.